



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2017- 2022
(REVISI TAHUN 2020)



PEMERINTAH KOTA CIMAHI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gd. C. Lt. IV
Telp/ Fax (022) 6631787, Website: www.cimahikota.go.id
email : dinasdpkpcimahi@gmail.com Kota Cimahi 40513
Jawa Barat



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Muhamad Nur Kuswandana, M. Eng. Sc
NIP : 196111121989031007
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Cimahi

Berdasarkan SK Wali Kota Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Nomor : 821.27/KEP.307-BKPSDMD/2017 tanggal 12 Juli 2017 Bertugas untuk dan atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, berkedudukan di Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Kota Cimahi.

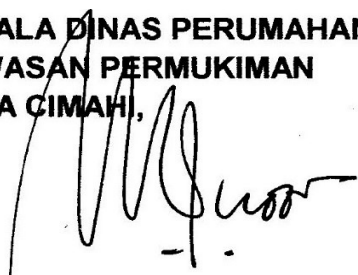
Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa :

1. Renstra disusun dengan benar dan terukur sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam tugas pokok fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk mewujudkan visi dan misi serta program kerja berdasarkan RPJMD Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022;
2. Berkomitmen yang tinggi untuk melaksanakan dan mewujudkan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 dengan menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan tanpa paksaan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 01 September 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAH,**


Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M. Eng.S
Pembina Utama Muda
NIP. 196111121989031007



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan Rahmat Hidayah dan Berkahnya sehingga kami dapat menyelesaikan “Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017–2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi”.

Perubahan Renstra Tahun 2017–2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di laksanakan karena adanya wabah penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan di tetapkan sebagai Keadaan Darurat Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (PHEIC). Wabah ini pun melanda wilayah Indonesia khususnya Kota Cimahi yang masih sampai saat ini berjuang untuk dapat melindungi warga masyarakat dari pandemik *Covid-19*, dengan langkah – langkah untuk mengendalikan dan memutus mata rantai penyebaran dan penularan penyakit dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat Kota Cimahi pada era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah. Sehubungan dengan upaya Pemerintah, maka sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Adapun realokasi dan recofusing dilakukan terhadap belanja barang dan atau belanja yang tidak mendesak, dan belanja modal yang tidak *urgen* kebutuhannya atau dapat di tunda sehingga penggunaan dana tersebut dapat terarah dengan baik tepat sasaran sesuai alokasinya.

Kami menyadari sepenuhnya penyusunan laporan Perubahan Renstra Tahun 2017 – 2022 jauh dari kata sempurna, namun demikian harapan kami semoga Perubahan Renstra tahun 2017–2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini dapat menjadi pedoman/ acuan dalam evaluasi pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, sehingga dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan

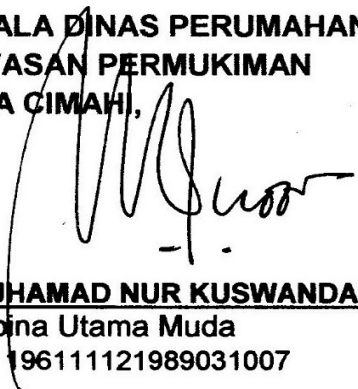


program dan kegiatan pada masa yang akan datang dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan (Stakeholders) yang membutuhkan informasi tentang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan terhadap semua kegiatan yang kita laksanakan. Aamiin YRA.

Cimahi, 01 September 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAHI,**


Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M. Eng.S
Pembina Utama Muda
NIP. 196111121989031007



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	9
2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi	9
2.1.2 Struktur Organisasi	10
2.2 Sumber Daya	19
2.2.1 Sumber Daya Manusia	19
2.2.2 Sumber Daya Aset/ Modal	22
2.3 Kinerja Pelayanan	23
2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum	23
2.3.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	23
2.4 Tantangan Peluang Pengembangan Pelayanan	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	32
3.1.1 Permasalahan Bidang Perumahan & Permukiman	32
3.1.2 Permasalahan Bidang Sarana & Prasarana	33
3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	38



3.6	Telaahan Isu Internasional	39
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN		
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	41
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN		
5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	44
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	46
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	73
 BAB VIII PENUTUP		
8.1	Penutup	76



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	17
Gambar 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	18
Gambar 2.3	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	19
Gambar 2.4	Komposisi Non-PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	19



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Analisis Beban Kerja	19
Tabel 2.2	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2017 - 2022	24
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	28
Tabel 2.4	Capaian Pelayanan Sektor Lingkungan Hidup	25
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi	43
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022	45
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 - 2022	48
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017 – 2022	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Sebagai salah satu unsur perangkat Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berkewajiban menyiapkan Renstra yang secara teknis merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap Nomenklatur sesuai dengan Nomenklatur yang baru. Dengan demikian diperlukan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) berdasarkan nomenklatur yang baru.



Tujuan utama penyusunan rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah dalam rangka mendukung pencapaian penjabaran visi dan misi yang hendak diwujudkan oleh Kota Cimahi Tahun 2017-2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017–2022 merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi secara organisatoris telah merumuskan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk lima tahun kedepan, yaitu Tahun 2017 – 2022 yang sangat relevan dengan upaya pengembangan paradigma pembangunan, pengelolaan kebijakan publik dan perumusan manajemen strategi untuk meningkatkan pelayanan publik dan sebagai pedoman dalam melaksanakan visi dan misi yang telah ditetapkan. Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah diharapkan penerapan asas akuntabilitas serta peningkatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat optimal melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran, yang disusun dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Politik, yaitu pendekatan yang melihat bahwa rencana pembangunan yang ada dalam RPJMD merupakan penjabaran dari Visi misi Walikota dan Wakil Walikota.

Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini berdasarkan pada metode ilmiah berdasarkan data dan informasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat di pertanggungjawabkan dengan kerangka manajemen strategis dan berbasis kinerja terhadap berbagai program pembangunan.

Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mendapatkan berbagai aspirasi sebagai masukan dokumen perencanaan pembangunan daerah,



serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan pengambilan keputusan.

Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up, hasil dari pendekatan bottom up melalui penjaringan aspirasi masyarakat bersama stakeholder melalui konsultasi publik, Forum Perangkat Daerah (FPD) dan Musrenbang RPJMD serta pendekatan top down dengan penyelarasan pada dokumen perencanaan provinsi dan nasional sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran.

Proses penyusunan Renstra sebagaimana termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra

Pada tahap ini dilakukan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal Renstra mencakup:

- Analisis gambaran pelayanan
- Analisis permasalahan
- Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
- Analisis isu strategis
- Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD
- Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja



- Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra.

4. Pelaksanaan Forum

Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dalam membahas Rancangan Renstra dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Kegiatan forum lintas perangkat daerah ini bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menjadi rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Perumusan rancangan akhir Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.



6. Penetapan Renstra

Rancangan terakhir Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi. Kegiatan verifikasi harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) **Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi** adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai salah satu bahan masukan bagi penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, dimana



suatu instansi pemerintah dituntut juga untuk melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan secara terus menerus.

Adapun tujuan dari penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan dan menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 2) Sebagai acuan /dasar bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
- 3) Memberikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang memuat rumusan kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternative atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah serta kendala yang dihadapi;
- 4) Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
- 5) Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penyusunan Rencana Strategis berikut tujuan dan sasaran serta peraturan perundangan terkait yang menjadi landasan hukum. Pada bab ini digambarkan pula pokok bahasan dalam penulisan Rencana Strategis, serta susunan garis besar isi dokumen Rencana Strategis



BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKMAN

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, serta mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Bab ini Menguraikan permasalahan terkait tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, telaahan visi , misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih telaahan Rencana Strategi Kementerian / Lembaga dan PD Provinsi, Kabupaten/Kota Lainnya, Telaahan RTRW dan KLHS serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini Memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi beserta indikator kinerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam lima tahun mendatang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN

Pada Bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Bab ini dikemukakan tentang indikator Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi Perumahan dan Permukiman, Bangunan, Gedung, dan Pertanahan.

2.1.1. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D) dan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325 Bab III, Bagian Ketujuh, Paragraf 2 Pasal 28, Tanggal 19 Oktober 2016). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi



2.1.2. Struktur Organisasi

Untuk mempermudah menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi mempunyai susunan struktur organisasi berdasarkan Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, dan Perwal Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi, adapun struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

2.1.2.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Adapun fungsi Kepala Dinas yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman, pertamanan dan dekorasi kota, drainase kota, sarana dan prasarana utilitas, air bersih dan air limbah
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman, pertamanan dan dekorasi kota, drainase kota, sarana dan prasarana utilitas, air bersih, dan air limbah
- c. Pengawasan dan pembinaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang penataan dan pengendalian perumahan dan permukiman, pertamanan dan dekorasi kota, drainase kota, sarana dan prasarana utilitas, air bersih, dan air limbah
- d. Pengelolaan administrasi kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Dinas yaitu :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka



Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) dinas;
- e. Merumuskan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Membina dan mengendalikan Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
- h. Merumuskan program dan kegiatan pada Sekretariat, Bidang Perumahan dan Permukiman, serta Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
- i. Melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah atau pemerintah provinsi ke Pemerintah Kota sesuai dengan bidang tugasnya;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- k. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Wali Kota;
- m. Melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Daerah dan instansi terkait lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- n. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan berlaku;
- o. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota.



2.1.2.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian dinas. Adapun fungsi sekretariat yaitu :

- a. Perencanaan operasional urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. Pengoordinasian urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan program dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Rincian tugas sekretariat yaitu :

- a. Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) dinas;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Mengoordinasikan Subbag Program dan Keuangan serta Subbag Umum dan Kepegawaian
- d. Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Merumuskan program dan kegiatan lingkup sekretariat;
- f. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, menghimpun, menganalisa dan mengevaluasi program dan pelaporan dinas;
- h. Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan pada dinas;
- i. Menganalisa kebutuhan pegawai pada dinas;
- j. Membagi jumlah seluruh pelaksana dinas untuk di tempatkan pada setiap bidang sesuai kebutuhan dan keahlian;



- k. Menganalisa kebutuhan, memelihara, mendayagunakan serta mendistribusikan sarana dan prasarana di lingkungan dinas agar efektif dan efisien;
- l. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan dinas;
- m. Mengelola administrasi kepegawaian dinas;
- n. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- o. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- p. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- q. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- r. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.**

2.1.2.3 Bidang Perumahan dan Permukiman

Bidang perumahan dan permukiman mempunyai tugas pokok Merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan perencanaan teknis urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman. Adapun fungsi Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
- c. Pengoordinasian urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;



- d. Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas bidang perumahan dan permukiman yaitu :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJ), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Menyusun bahan LPPD, LKPJ, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;
- e. Meyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perumahan dan permukiman yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring;
- f. Melaksanakan kebijakan dan strategi kota mengenai bidang perumahan dan permukiman;
- g. Mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, mengontrol bidang perumahan dan permukiman;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



Bidang Perumahan dan Permukiman membawahi :

- a. Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman;**
- b. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota;**
- c. Seksi Drainase Kota.**

2.1.2.4 Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman. Adapun fungsi dari Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman, yaitu :

- a. Perencanaan kegiatan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- b. Pengelolaan urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- c. Pengoordinasian urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- d. Pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan alasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman yaitu :

- a. Menyusun bahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) sesuai lingkup tugasnya;
- b. Menyusun bahan kebijakan teknis Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- c. Menyusun LPPD, LKPD, LKIP dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- d. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai lingkup tugasnya;



- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- f. Melaksanakan kebijakan dan strategis kota mengenai sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- g. Mengendalikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, mengontrol bidang sarana prasarana perumahan dan permukiman;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- i. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Bidang Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman membawahi :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilitas;**
- b. Seksi Air Bersih;**
- c. Seksi Air Limbah.**

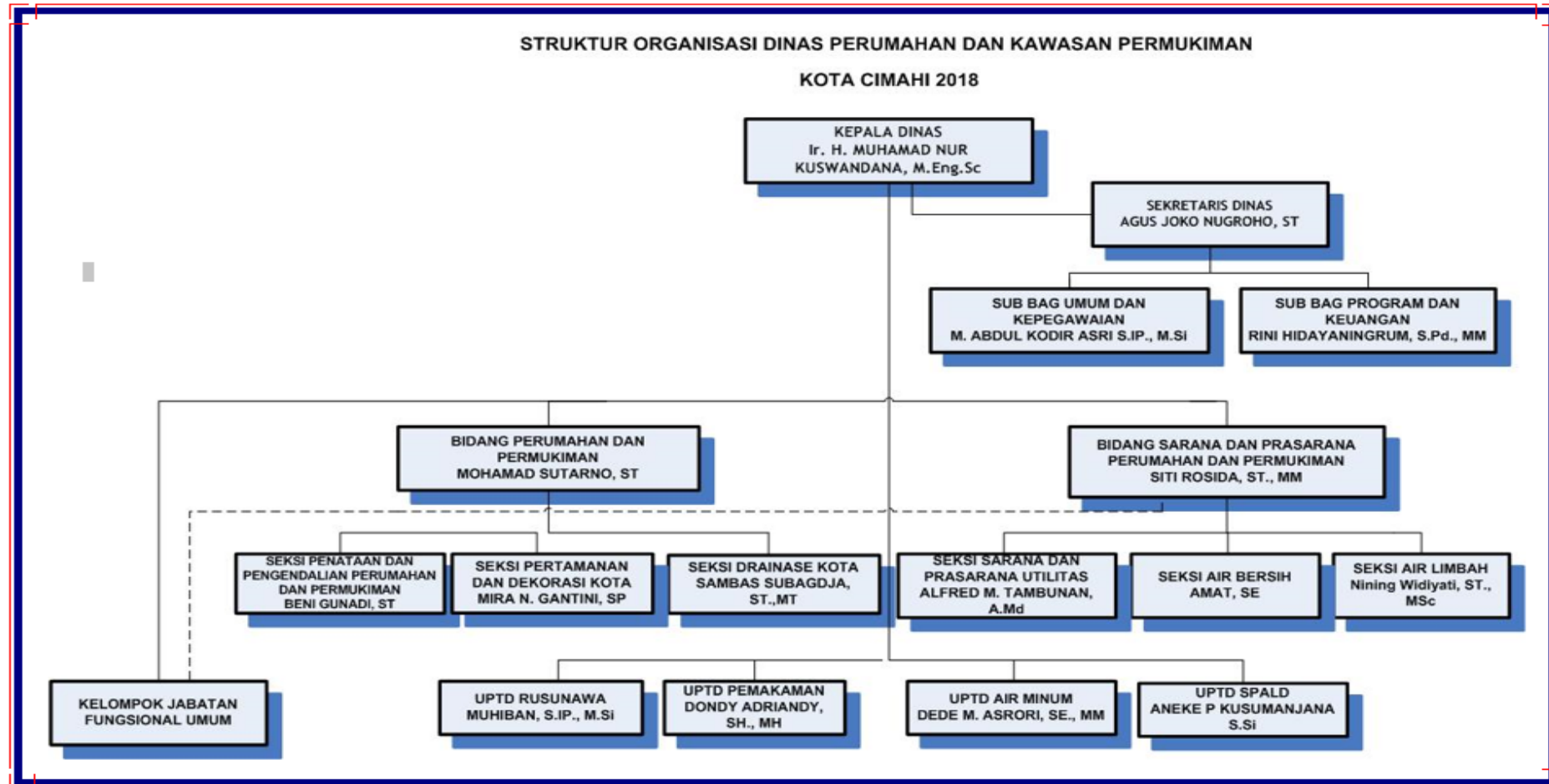
2.1.2.5 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional, pada Dinas maka dibentuk UPTD. Pembentukan dan susunan serta tugas Pokok, Fungsi, Rincian, Tugas Unit, dan Tata Kerja UPTD ditetapkan oleh Wali Kota.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas tentang struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi, maka untuk lebih jelas bisa dilihat pada **gambar 2.1** dibawah ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi





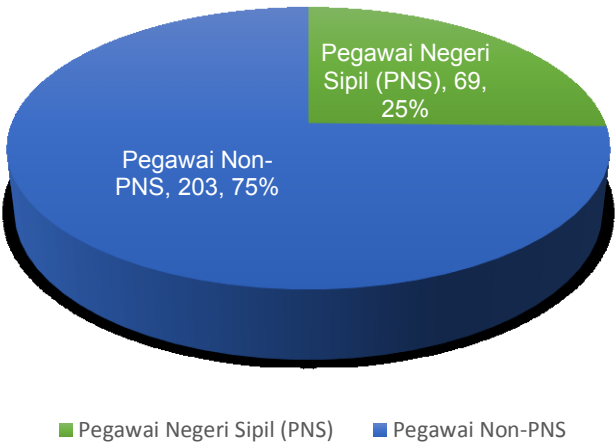
2.2. Sumber Daya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Secara umum keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi tidak terlepas dari peran aktif SDM organisasi itu sendiri. Untuk mendukung pencapaian kinerja dari setiap individu, kelompok kerja maupun kinerja sebagai hasil usaha seluruh komponen dalam organisasi perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai disamping ketersediaan anggaran yang cukup.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi didukung oleh 271 (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) personil yang terdiri dari 69 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 203 ORANG Pegawai Non-PNS (**Gambar 2.2**).

Gambar 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

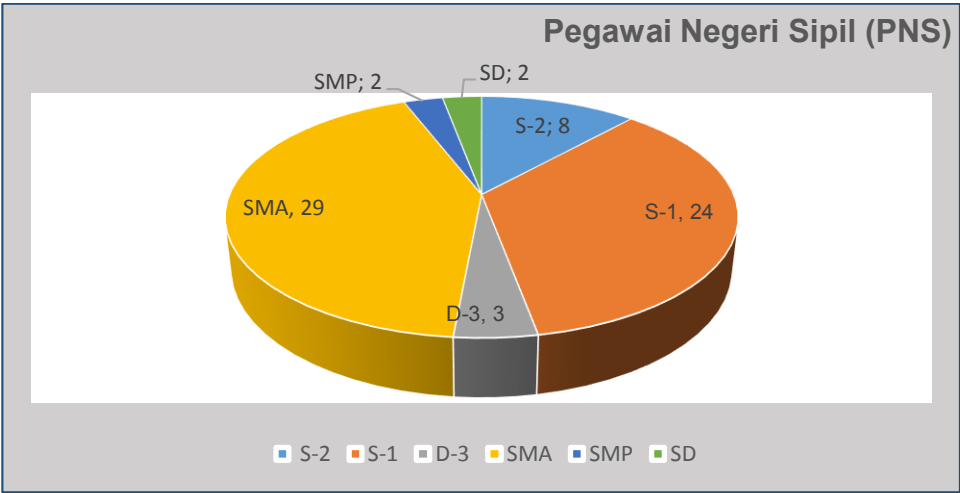


Untuk meningkatkan kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi telah dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kebutuhan teknis. Peningkatan ini dibuktikan dengan banyaknya pegawai yang berhasil meraih gelar sarjana ataupun paskasarjana setelah bekerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

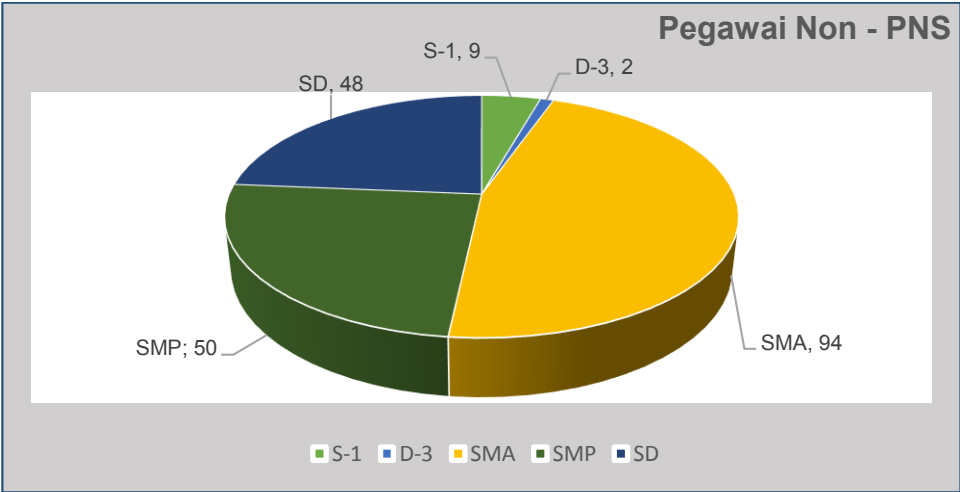
Berdasarkan laporan Subbagian Kepegawaian dan Umum, tingkat pendidikan pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi didominasi oleh lulusan SMA dan Sarjana. Untuk data pendidikan pegawai bisa dilihat pada **gambar 2.3**.



Gambar 2.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 2.4
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Berdasarkan analisis beban kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi bisa dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Analisis Beban Kerja
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN PEGAWAI	+/-
1	KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	14	1	1	0
2	SEKRETARIS	12	1	1	0
3	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1	1	0
5	KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA	7	1	1	0
6	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	6	1	1	0



NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN PEGAWAI	+/-
7	PRANATA KEARSIPAN	6	0	1	-1
8	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	5	0	1	-1
9	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1	1	0
10	PRAMU BAKTI	1	1	1	0
11	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	9	1	1	0
12	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	7	0	1	-1
13	ANALIS RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	7	1	1	0
14	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN	7	1	1	0
15	BENDAHARA	7	2	2	0
16	PENGELOLA KEUANGAN	6	3	4	-1
17	KEPALA BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	11	1	1	0
18	KEPALA SEKSI PENATAAN DAN PENGENDALIAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	9	1	1	0
20	ANALIS PERUMAHAN	7	0	1	-1
21	JURU SURVEY PERMUKIMAN PERUMAHAN	5	1	1	0
22	KEPALA SEKSI PERTAMANAN DAN DEKORASI KOTA	9	1	1	0
23	ANALIS TAMAN	7	1	1	0
24	PENGAWAS TATA PERTAMANAN	7	1	1	0
25	PENGELOLA DATA	6	0	3	-3
26	PRANATA TAMAN	5	1	2	-1
27	PRAMU TAMAN	1	2	2	0
28	KEPALA SEKSI DRAINASE KOTA	9	1	1	0
29	ANALIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	7	1	2	-1
30	PENGELOLA SUMBER DAYA AIR	6	0	2	-2
31	PRANATA PENYEHATAN LINGKUNGAN	6	0	1	-1
32	JURU OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	5	3	3	0
33	PENJAGA PINTU AIR	5	0	2	-2
34	PENGADMINISTRASIAN UMUM	5	0	1	-1
35	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	5	2	44	-42
36	KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA UTILITAS	11	1	1	0
37	KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA UTILITAS	8	1	1	0
38	ANALIS PERUMAHAN	7	0	1	-1
39	PENGELOLA DAN PENATAAN SARANA DAN PRASARANA	6	1	1	0
40	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	0	2	-2
41	KEPALA SEKSI AIR BERSIH	8	1	1	0



NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN PEGAWAI	+/-
42	ANALIS PENGEMBANG INFRASTRUKTUR	7	1	1	0
43	ANALIS PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	7	0	1	-1
44	PENGELOLA PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDA	6	0	3	-3
45	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1	1	0
46	KEPALA SEKSI AIR LIMBAH	9	1	1	0
47	PENELAHAH MUTU KONTRUKSI	7	0	1	-1
48	PENELAHAH PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	7	1	1	0
49	PENGELOLA DATA	6	0	1	-1
50	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI	6	0	1	-1
51	PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	2	-2
52	TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	0	1	-1
53	KEPALA UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	9	1	1	0
54	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA	9	1	1	0
55	PENGELOLA DATA	6	0	3	-3
56	PENGELOLA KEUANGAN	6	2	2	0
57	PENGELOLA PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	6	2	2	0
58	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	6	0	8	-8
59	PENGADMINISTRASI UMUM	5	0	1	-1
60	KEPALA UPTD PEMAKAMAN	9	1	1	0
61	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PEMAKAMAN	8	1	1	0
62	PENGELOLA DATA	6	0	1	-1
63	PENGELOLA KEUANGAN	6	1	1	0
64	PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA	6	1	1	0
65	PENGADMINISTRASI UMUM	5	1	1	0
66	JURU PUNGUT RETRIBUSI	3	0	1	-1
67	PRAMU BAKTI	1	1	1	0
68	PRAMU PEMAKAMAN	1	3	3	0
69	KEPALA UPTD AIR MINUM	9	1	1	0
70	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD AIR MINUM	8	1	1	0
71	PEMNELAHAH PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	7	0	1	-1
72	PENGELOLA DATA PELAYANAN	6	0	2	-2
73	PENGELOLA KEBUTUHAN LOGISTIK	6	0	1	-1
74	PENGELOLA KEUANGAN	6	1	2	-1
75	PENGELOLA PENGGUNAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SDA	6	0	1	-1
76	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	0	3	-3



NO	NOMENKLATUR JABATAN	KELAS JABATAN	BEZZETING	KEBUTUHAN PEGAWAI	+/-
77	PETUGAS OPERASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	5	0	3	-3
78	TEKNISI KECIPTAKARYAAN	5	0	5	-5
79	PENGEMUDI	3	0	4	-4
80	KEPALA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	9	1	1	0
81	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	8	1	1	0
82	PENGOLAH DATA PELAYANAN	6	0	1	-1
83	PENGELOLA DATA	6	0	2	-2
84	PENGELOLAKEUANGAN	6	0	1	-1
85	PENGELOLA LIMBAH	6	1	2	-1
86	TEKNISI SARANA DAN PRASARANA	6	0	1	-1
87	PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA	5	0	3	-3
88	PENGADMINISTRASIAN UMUM	5	0	1	-1
89	PENGEMUDI	3	1	6	-5
	TEKNISI PENGAIRAN				
90	PENYELIA	8	0	0	0
91	PELAKSANA LANJUTAN / MAHIR	7	0	0	0
92	PELAKSANA / TERAMPIL	6	2	2	0
	TEKNISI PENYEHATAN LINGKUNGAN				
93	AHLI MADYA	11	0	0	0
94	AHLI MUDA	9	0	0	0
95	AHLI PERTAMA	8	1	1	0
	JUMLAH		62	178	-116

2.2.2. Sumber Daya Asset/Modal

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kerja yang baik. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan organisasi, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang terselenggaranya suatu proses atau usaha agar tujuan organisasi tercapai. Secara umum sarana dan prasarana digunakan antara lain untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.



2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi secara umum tergambar dalam indikator kinerja daerah RPJMD 2017-2022, menurut Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang termasuk urusan wajib pelayanan dasar Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah :

2.3.1 Urusan Pekerjaan Umum.

➤ Bidang Air Minum

SPM bidang Air Minum tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 29/PRT/M/2018. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut. Di akhir tahun 2019 ternyata data hasil capaian pelayanan belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena rencana pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Jaringan Perpipaan terkendala satu dan lain hal.

➤ Bidang Air Limbah

SPM pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah jumlah penduduk yang terlayani sistem pengelolaan air limbah baik setempat maupun terpusat pada tahun 2019 sebesar 60%. Namun menjadi catatan penting bahwa target tahun 2019 terkait sektor air limbah domestik adalah universal akses air limbah domestik sebesar 100% yang berarti bahwa seluruh penduduk sudah terlayani oleh sistem pengolahan air limbah domestik baik berupa on site maupun off site sistem.

2.3.2 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

➤ Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Target pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah melalui penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Akan tetapi di kota Cimahi, rehabilitasi rumah tidak layak huni bukan untuk korban bencana atau yang terkena relokasi program pemerintah, akan tetapi sifatnya fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu dan berpenghasilan rendah.

Adapun capaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada **tabel 2.2** berikut ini:



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4 (2021)	5 (2022)	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Urusan Pekerjaan Umum																			
1	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	-	-	-	70,52%	72,02%	79,24%	69,65%	69,82%	69,34%	70,35%	-	-	-	98,32%	97,68%	-	-	-
2	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	-	-	-	76,75%	83,41%	90,06%	76,78%	77,48%	82,66%	83,41%	-	-	-	107%	91,09%	-	-	-
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																			
3	Presentase Rumah Tidak Layak Huni	-	-	-	23%	42%	61%	80%	100%	98,52%	99,53%	-	-	-	428%	236%	-	-	-
4	Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan	-	-	-	7,03 Ha	6,71 Ha	5,17 Ha	12,04 Ha	12,04 Ha	61,50 Ha	12,04 Ha	-	-	-	874%	179%	-	-	-



Berdasarkan **tabel 2.2** diatas kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat dijelaskan sebagai berikut:

❖ **Presentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum**

Realisasi presentase cakupan pelayanan air bersih/air minum mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar 1,01% dari 69,34% menjadi 70,35%. Akan tetapi jika dibandingkan dengan target renstra 2017-2022 cakupan pelayanan air bersih/air minum belum mampu mencapai target yang ditentukan, dikarenakan berbagai permasalahan antara lain:

- a) Belum tersedia nya lahan untuk pengembangan sistem pengolahan air bersih/ air minum (SPAM) skala kota yang membutuhkan lahan cukup luas.
- b) Keterbatasan air baku baik itu air tanah maupun air permukaan.
- c) Pemenuhan kebutuhan air bersih yang belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Dalam meningkatkan cakupan pelayanan air bersih/air minum perlu ada peningkatan anggaran baik dari APBD maupun sumber lain serta peningkatan kapasitas SDM di seksi Air Bersih baik itu secara kualitas maupun kuantitas sehingga efisiensi sumber daya dapat ditingkatkan.

Telah dilakukan pula upaya pemecahan masalah tersebut namun pada kenyataannya masih saja ada permasalahan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu Seksi Air Bersih sedang mencari berbagai cara/strategi dalam pengembangan pelayanan air bersih dimulai dari mencari alternatif sumber air baku di dalam wilayah Kota Cimahi hingga kerjasama regional antara Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung untuk menyuplai air bersih ke masyarakat Kota Cimahi.

❖ **Presentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik**

Cakupan pelayanan air limbah domestik tahun 2019 adalah 419.288 jiwa naik 20.594 jiwa dari tahun 2018 sebesar 398.694 jiwa, untuk melayani air limbah domestik masyarakat Kota Cimahi telah dibangun 675 unit jamban keluarga, 135 unit septictank komunal, dan 233 unit MCK, total penduduk yang dilayani 126.953 Kepala Keluarga.

Presentase cakupan pelayanan air limbah domestik tahun 2019 meningkat sebesar 3,28% dari tahun 2018 menjadi 84,31%, sedangkan untuk rasio capaian telah melebihi target yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam prosesnya masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:



- a) Terbatasnya lahan dan kesadaran masyarakat terkait IPAL Komunal masih terbatas sehingga masih ada penolakan dari masyarakat untuk pembangunan IPAL Komunal.
- b) Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPT ALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja.
- c) Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang terbukti dengan banyaknya sampah padat yang ditemukan di dalam bak kontrol dan IPAL sehingga menyebabkan sistem pengolahan tidak maksimal.

Capaian SPM sektor Air Limbah Kota Cimahi tahun 2018 – 2019 dengan jenis pelayanan dasar yaitu penduduk yang terlayani sistem pengolahan air limbah domestik, target SPM sebesar 60% dengan capaian pada tahun 2018 adalah 72,70% dan capaian tahun 2019 adalah 75,98% dimana kontribusi tangki septic individual adalah 72,60%, MCK adalah 2,07%, IPAL SPALD-T adalah 7,88%.

❖ **Presentase Rumah Layak Huni**

Realisasi persentase rumah layak huni meningkat 1,00% dari 98,53% pada tahun 2018 menjadi 99,53% di tahun 2019. Sedangkan rasio capaian terhadap target renstra jauh melebihi target. Jumlah rumah layak huni di Kota Cimahi pada tahun 2018 adalah 155.184 rumah dari total 157.523 rumah di Kota Cimahi, lalu pada tahun 2019 jumlah rumah layak huni di Kota Cimahi meningkat 1.600 menjadi 156.784 rumah layak huni dan menyisakan 739 rumah tidak layak huni pada tahun 2019.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan antara lain :

- a) Peningkatan layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi.
- b) Keterbatasan Anggaran.
- c) Swadaya masyarakat yang masih minim, padahal kegiatan ini bersifat stimulan, dimana swadaya menjadi syarat utama untuk keberhasilan output kegiatan fisik di lapangan.

❖ **Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Ringan**

realisasi capaian luas kawasan kumuh sedang dan ringan pada tahun 2019 adalah 49,46 Ha, berdasarkan surat keputusan (SK) Kumuh yang



ditetapkan oleh Walikota Cimahi pada tahun 2015, luas kumuh Kota Cimahi sebesar 176,77 Ha, sedangkan yang masuk prioritas flag 1 seluas 162,56 Ha. Capaian pengurangan kumuh yang dihasilkan dari kegiatan KOTAKU dan kolaborasi pada tahun 2019 di Kota Cimahi berdasarkan hasil rapat perhitungan capaian pengurangan kumuh adalah sekitar 49,46 Ha, dari sisa luas kumuh tahun 2018 sebesar 61,50 Ha sehingga menyisakan 12,04 Ha di Kelurahan Setiamanah dari target luas flag 1 sebesar 162,56 Ha pada tahun 2019.

Pelaksanaan kegiatan KOTAKU terutama dalam target penanganan luasan kumuh ada beberapa isu kritis yang dihadapi di Kota Cimahi sehingga menyisakan luasan kumuh dari target yang sudah ditetapkan yaitu:

- a) Belum adanya database yang lengkap kegiatan - kegiatan penanganan kumuh terutama dari kegiatan kolaborasi, sehingga kesulitan untuk memasukkan data kolaborasi dalam perhitungan capaian pengurangan kumuh di Kota Cimahi.
- b) Masyarakat menginginkan kegiatan penanganan permasalahan lingkungan yang dilaksanakan merata di semua wilayah tidak hanya di wilayah kumuh RT Flag, sehingga kegiatan kolaborasi banyak yang tidak berdampak terhadap perhitungan capaian pengurangan luasan kumuh.

Kinerja pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlepas dari sumber pembiayaan yang ada. Banyaknya sektor didalamnya membuat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi membutuhkan sumber dana yang sangat besar.

Adapun uraian anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5	1 (2018)	2 (2019)	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN DAERAH																	
Pendapatan Asli Daerah	2.778.399.200	3.649.076.000	6.938.440.000	-	-	3.810.051.368	6.109.592.287	-	-	-	137,13%	167,42%	-	-	-	3.093.396.160	5.347.582.013
Hasil Retribusi Daerah	2.778.399.200	3.649.076.000	6.938.440.000	-	-	3.810.051.368	6.109.592.287	-	-	-	137,13%	167,42%	-	-	-	3.093.396.160	5.347.582.013
BELANJA DAERAH	155.242.534.325	184.774.247.439	111.678.168.450	-	-			-	-	-			-	-	-		
Belanja Tidak Langsung	9.176.240.096	8.991.080.000	9.657.822.200	-	-	8.538.855.554	8.720.394.996	-	-	-	93,05%	96,98%	-	-	-	7.155.831.981	7.012.623.885
Belanja Pegawai	9.176.240.096	8.991.080.000	9.657.822.200	-	-	8.538.855.554	8.720.394.996	-	-	-	93,05%	96,98%	-	-	-	7.155.831.981	7.012.623.885
Belanja Langsung	146.066.294.229	175.783.167.439	102.020.346.250	-	-	82.553.070.112	106.910.752.574	-	-	-	56,51%	60,81%	-	-	-	146.569.908.593	90.400.138.552
Program Pengembangan Perumahan	103.866.176.600	95.121.998.000	18.807.149.100	-	-	51.433.358.826	65.815.339.490	-	-	-	49,51%	69,19%	-	-	-	74.348.762.680	55.528.667.725
Program Peningkatan Pelayanan Air Limbah Domestik	12.418.665.700	20.548.766.514	19.429.990.128	-	-	8.534.359.315	13.346.766615	-	-	-	68,72%	64,95%	-	-	-	18.065.033.374	11.639.894.752



Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata – Rata Pertumbuhan	
	1 (2018)	2 (2019)	3 (2020)	4	5	1 (2018)	2 (2019)	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	9.338.436.200	7.740.476.600	4.410.950.700	-	-	2.982.302.043	6.120.873.050	-	-	-	31,93%	79,07%	-	-	-	5.873.789.360	5.524.412.641
Program Peningkatan Pelayanan Air Bersih	9.098.354.600	39.043.305.304	15.662.727.224	-	-	7.427.589.300	10.155.025.445	-	-	-	81,63%	26,00%	-	-	-	37.223.634.384	8.669.507.585
Program Peningkatan Kapasitas Sungai dan Pengendali Banjir	6.457.742.800	7.248.154.778	39.730.258.598	-	-	5.259.201.050	5.911.844.936	-	-	-	81,44%	81,56%	-	-	-	5.956.606.218	4.860.004.726
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.409.095.000	5.529.199.055	3.680.371.500	-	-	1.368.604.928	5.163.266.007	-	-	-	97,12%	93,38%	-	-	-	5.247.380.055	4.889.545.021
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	300.543.700	293.167.188	183.449.000	-	-	241.936.600	278.737.031	-	-	-	80,49%	95,07%	-	-	-	233.058.448	230.349.711
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara	224.340.000	258.100.000	115.450.000	-	-	201.984.000	118.900.000	-	-	-	90,03%	46,06%	-	-	-	212.213.000	78.503.200



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

a. Faktor Tantangan (*Threats*) yaitu :

Beberapa tantangan (*threats*) yang perlu diantisipasi, antara lain :

- Adanya berbagai sub-wilayah yang memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan, infrastruktur fasilitas air bersih, listrik dan telepon dan terbatasnya daerah resapan air dan adanya daerah rawan genangan banjir;
- Tingginya permintaan lahan untuk pemukiman, pusat pelayanan, industri , usaha dan kegiatan perekonomian (*ats*) yang perlu diantisipasi, antara lain :
- Adanya berbagai sub-wilayah yang memiliki infrastruktur sosial ekonomi dan fisik yang kurang memadai, terutama jaringan jalan, infrastruktur fasilitas air bersih, listrik dan telepon dan terbatasnyalainnya.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dan lembaga dalam pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan perumahan dan kawasan permukiman.

b. Faktor Peluang (*Opportunities*) yaitu :

Beberapa peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan, antara lain sebagai berikut :

- Lokasi geografis Kota Cimahi yang terletak di lintasan jalur ekonomi regional dan sebagai kota satelit;
- Bantuan program dan anggaran untuk pembangunan, penambahan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yang bersumber dari APBD Provinsi, APBN Pusat, Bantuan Luar Negeri, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Dana lainnya yang tidak mengikat;
- Adanya tuntutan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, sehingga menuntut adanya peningkatan kinerja guna mewujudkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang profesional dan handal (*good enviromental governance*);



- Adanya peran serta dan kepedulian dari masyarakat terhadap pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Berkoordinasi dengan Pemerintahan Kota/ Kabupaten, Provinsi dan Pusat untuk menyelesaikan permasalahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pembangunan sebagai upaya pencapaian tujuan daerah perlu dilaksanakan dengan seksama, efektif, efisien dan terpadu. Dengan demikian, pembangunan perlu secara sadar dibimbing melalui arah kebijakan Pemerintah. Arah kebijakan Pemerintah ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang harus ditempuh agar pelaksanaan pembangunan mencapai hasil yang diharapkan yaitu efektif dan efisien.

3.1.1 Permasalahan Bidang Perumahan dan Permukiman

Permasalahan dan isu strategis diperoleh dari hasil analisis terhadap kondisi eksisting Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kota Cimahi, serta hasil masukan SKPD terkait yang dilakukan melalui pelaksanaan FGD (*Forum Group Discussion*). Adapun permasalahan pokok / isu strategis pada masing – masing sector bidang perumahan dan permukiman di Kota Cimahi antara lain:

A. Sektor Drainase:

1. Drainase kota yang masih belum memadai sehingga sering terjadi banjir di beberapa titik.
2. Tidak berfungsinya saluran pembuangan air sebagaimana mestinya.
3. Masih terdapat genangan air di beberapa titik kawasan permukiman.



4. Berkurangnya daerah resapan dan area dengan tingkat resapan tinggi.
5. Belum optimalnya penanganan terhadap daerah rawan banjir.
6. Penyumbatan/ tidak mengalirnya saluran.

B. Sektor Kawasan Permukiman

1. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh dan rumah tidak layak huni.
2. Belum maksimalnya infrastruktur yang tersedia sebagai faktor utama yang mendukung terciptanya kawasan permukiman yang efektif.
3. Peningkatan layanan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi.
4. Keterbatasan lokasi atau lahan untuk pengembangan perumahan baru yang sesuai dengan penyediaan rumah murah karena mahalnya harga tanah/ lahan.
5. Belum optimalnya ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang khususnya dalam hal yang terkait dengan penataan kawasan permukiman serta alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan yang lain.
6. Penurunan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan yang dapat mengurangi kenyamanan dan keindahan serta dekorasi kota.

3.1.2 Permasalahan Bidang Sarana dan Prasarana

Permasalahan dan isu strategis diperoleh dari hasil analisis terhadap kondisi eksisting Kawasan Perumahan dan Permukiman di Kota Cimahi, serta hasil masukan SKPD terkait yang dilakukan melalui pelaksanaan FGD (*Forum Group Discussion*). Adapun permasalahan pokok / isu strategis pada masing – masing sector bidang sarana dan prasarana di Kota Cimahi antara lain:

A. Sektor Air Bersih:

1. Peningkatan layanan air bersih perpipaan belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.
2. Keterbatasan sumber air baku.
3. Penurunan muka air tanah.



4. Keterbatasan/ sulit mendapatkan lahan untuk pembangunan Sistem Pengolahan Air Miinum.
5. Kualitas air tanah mulai tercemar/ tidak layak minum.
6. Lambannya program penyediaan SPAM regional.
7. Tidak berjalannya/ tidak optimalnya kelompok pengguna dan pemanfaat air.

B. Sektor Air Limbah:

1. Perlu ada lahan yang memenuhi kriteria teknis IPAL.
2. Hasil uji kualitas air limbah domestik belum memenuhi baku mutu Permen LHK No 68 Tahun 2016.
3. Penyedotan lumpur tinja oleh UPT ALD terkendala lokasi IPAL komunal yang sulit dijangkau oleh mobil tangki sedot.
4. Belum tersedianya IPLT di Kota Cimahi mengharuskan UPT ALD membuat MoU dengan PDPAM Kota Bandung untuk pembuangan lumpur tinja.
5. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang.
6. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih kurang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis SKPD merupakan penjabaran yang lebih detail dari arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam Visi Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022 yaitu, **“MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS, DAN BERBUDAYA”**. Yang akan diwujudkan dalam lima tahun ke depan dan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kota Cimahi dibagi menjadi beberapa Misi yang berkaitan satu dengan lainnya yang akan dicapai dan dituangkan melalui arah kebijakan pembangunan dan dijabarkan ke dalam prgram Satuan Kerja Perangkat Daerah masing – masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.



2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, efisien, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik.
3. Memberdayakan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Sebagai wujud dukungan terhadap Visi Misi Kota Cimahi atas Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2017-2022, tersebut, agar tetap sesuai dengan arah kebijakan pembangunan pencapaian visi dan misi pemerintah kota juga untuk mendorong agar sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tetap mengacu kepada visi dan misi serta program prioritas pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2017 – 2022.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tersurat dan tersirat dalam Misi 4 (empat) misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi terpilih periode 2017 – 2022 yaitu, **“Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan”**.

Pada misi ini terlihat jelas peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan berupa penyediaan rumah layak huni dan membangun sarana prasarana dan utilitas yang berkualitas dan berkelanjutan.



3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kota/Kabupaten

Sebagaimana diamanatkan pada Permendagri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional serta diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan Provinsi, Nasional dan rencana pembangunan daerah.

Renstra Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi mengacu pada Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat serta Renstra Kementerian Perumahan Republik Indonesia. Dengan adanya sinkronisasi Renstra antara Propinsi dan Pusat diharapkan program dan kegiatan Pemerintah Kota, Propinsi dan Pusat dapat berjalan searah.

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitas penyediaan pembiayaan infrastruktur Dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia di Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitas penyediaan pembiayaan perumahan, sarana strategis yang ingin dicapai oleh kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu:

1. Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2. Meningkatkan penyediaan dan pembiayaan perumahan.
3. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan aspek tata ruang. Tata ruang merupakan instrumen untuk mengarahkan aspek kewilayahan dalam bentuk alokasi kegiatan – kegiatan sosial – ekonomi, pusat pelayanan, infrastruktur, serta permukiman yang akan saling memperkuat satu dengan lainnya dalam konteks pengembangan kota yang berkelanjutan.



RTRW Kota Cimahi yang sudah disesuaikan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai kota inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif. Oleh karenanya, RTRW berfungsi sebagai acuan lokasi dan investasi pembangunan serta menjadi pedoman dalam merumuskan program-program kewilayahan dan lintas kewilayahan dalam dokumen RPJMD maupun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.

Perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD telah diupayakan untuk dapat mengisi, mengembangkan dan memelihara ruang beserta sumber daya yang ada di dalamnya, sehingga pencapaian target RTRW dapat didukung secara nyata oleh RPJMD. Dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka keberadaan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD maupun RTRW Kota Cimahi.

Pada setiap tingkatan perencanaan pembangunan, mulai dari RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJMD Kota Cimahi, dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan dengan RTRWN, RTRWP Jawa Barat dan RTRW Kota Cimahi, serta dengan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kota Cimahi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya Pasal 15, disebutkan bahwa instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) wajib dilaksanakan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana, dan program.

KLHS yang telah disusun Pemerintah Kota Cimahi adalah suatu dokumen telaah (assessment document) yang disertai dengan rekomendasi terhadap isu-isu lingkungan hidup dari kebijakan, rencana atau program yang telah tersusun/terlaksana salah satunya adalah RPJMD Kota Cimahi. Rekomendasi tersebut umumnya berupa kegiatan - kegiatan yang sebaiknya dilakukan Pemerintah Kota Cimahi khususnya Dinas Perumahan dan Kawasan



Permukiman Kota Cimahi untuk meminimalisir dampak lingkungan yang mungkin terjadi, antara lain:

1. Peningkatan fungsi resapan dan keanekaragaman hayati melalui pembangunan Sumur Resapan dan Embung, penanaman pohon dan pengembangan Green Building;
2. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Non Hijau di seluruh wilayah Kota Cimahi serta peningkatan penguasaan lahan oleh Pemerintah Kota sebagai usaha pengendalian alih fungsi lahan;
3. Pengendalian dan pengawasan kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak pencemaran lingkungan termasuk pemanfaatan air tanah dalam;
4. Pengelolaan air limbah domestik melalui pembangunan IPAL skala komunal dan skala kota dalam rangka memperbaiki kualitas tanah dan air sehingga mampu meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dirumuskan dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan Kota Cimahi yang dianggap paling prioritas untuk segera diselesaikan. Metode yang digunakan dalam penentuan isu strategis Renstra yaitu dengan diskusi secara terfokus terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi. Berdasarkan hasil telaah terhadap visi misi Wali Kota Cimahi, telaah Renstra K/L, telaah isu internasional, dan hasil identifikasi permasalahan yang ada. Dapat dirumuskan isu strategis dalam pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

Infrastruktur perkotaan, yang diantaranya jalan, air bersih, pelayanan air limbah dan drainase di Kota Cimahi secara kuantitas sudah mencapai layanan lebih dari 50 persen dari jumlah penduduk ataupun luas wilayah kota. Namun yang perlu menjadi perhatian lebih lanjut, yaitu sejauh mana kuantitas infrastruktur tersebut dapat melayani masyarakat secara berimbang sehingga bisa meningkatkan daya saing kota. Demikian pula dengan air bersih, air limbah dan drainase, yang secara kualitas layanan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal.

Kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang rendah menyebabkan banyaknya rumah atau lingkungan/kawasan permukiman yang tidak layak huni. Sebagian besar permukiman kumuh berada di



Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan yang merupakan kawasan permukiman yang bercampur dengan kegiatan industri. Tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan yang tinggi berdampak terhadap tingginya jumlah kawasan kumuh yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan.

Kawasan perumahan yang belum tertata dengan baik di Kota Cimahi pada umumnya adalah perumahan yang dibangun oleh individu di lahan yang belum dipersiapkan dan belum dilengkapi dengan sarana prasarana pendukungnya, penataan bangunan yang tidak teratur dan pada lokasi tertentu cenderung menjadi perumahan yang kumuh.

2. Mengentaskan Banjir Melong

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi terus berupaya mengentaskan banjir melong di Kecamatan Cimahi Selatan sebagai salah satu prioritas pembangunan dari Wali Kota Cimahi. Upaya yang dilakukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah dengan pembuatan embung seluas 6.000 m² di lahan milik PT. Dewa Sutratex dan embung di kelurahan Pasirkaliki seluas 8.000 m².

3.6 Telaahan Isu Internasional

Isu internasional yang berkembang pada saat penyusunan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yaitu penyebaran virus COVID-19 atau virus Corona. Baru-baru ini tengah menjadi perhatian dunia mengenai adanya virus baru yang menyerang saluran pernafasan yaitu virus COVID-19. Virus corona ini adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang seperti MERS atau SARS.

Diketahui virus ini sudah mewabah di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Lalu pada awal Januari ini WHO sudah mengidentifikasi virus tersebut sebagai Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Selanjutnya pada Februari WHO mengumumkan nama resmi virus ini adalah COVID-19.

Pandemi corona telah menyerang lebih luas, hampir seluruh negara di dunia terinfeksi virus yang bermula dari Wuhan, China, dan kini telah tembus 700 ribu lebih kasus dengan 37 ribu korban jiwa. Angka ini masih terus bertambah hari demi hari. WHO melihat bagaimana Covid-19 memporak-porandakan suatu negara karena sistem kesehatan yang tak memadai. Kebutuhan akan fasilitas medis yang meroket begitu tajam dalam hitungan hari, sementara sarana, prasarana sampai tenaganya sangat-sangat terbatas.



Banyak negara kewalahan luar biasa dan memaksa keras sistem kesehatannya. Kondisi ini juga berakibat fatal ke para tenaga medis yang bertempur dan bertaruh nyawa melawan pandemi ini. Mereka bekerja dengan alat yang terbatas dan tak bisa beroperasi efektif.

Covid-19 diperkirakan akan menahan percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020, Dampak Covid-19 pada inflasi diperkirakan terbatas. Secara keseluruhan prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih rendah, yaitu menjadi 5,0%-5,4% dari perkiraan semula sebesar 5,1%-5,5%. Revisi perkiraan ini terutama karena pengaruh jangka pendek dari tertahannya pemulihan ekonomi dunia akibat Covid-19.

➤ **Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19**

Seiring dengan mewabahnya Covid-19 maka diperkirakan akan terjadi penurunan kinerja ekonomi secara global hingga ke tingkat lokal termasuk Kota Cimahi akibat menurunnya penurunan ekspor, investasi dan tertahannya konsumsi. Terlebih diperkirakan work from home dan social distancing sebagai salah satu upaya mengurangi penyebaran Covid-19 akan berdampak kepada sektor pariwisata khususnya pelaku industri hotel dan restoran.

Diperkirakan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2020 akan turun sekitar 0,1-0,2 point atau sekitar 20% dari prediksi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan secara makro ekonomi struktur perekonomian kota sangat tergantung kepada kinerja sektor industri manufaktur khususnya tekstil.

Pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia termasuk Kota Cimahi melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020. Kebijakan ini diambil untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Visi dan misi pembangunan Kota Cimahi yang tertuang di dalam RPJPD dan RPJMD, serta tujuan penataan ruang yang tertuang di dalam RTRW Kota Cimahi, belum secara eksplisit menyatakan keinginan yang ingin dicapai dalam pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi, maka untuk menegaskan kondisi objektif yang diinginkan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi pada kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang, maka perlu dirumuskan tujuan dan sasaran khusus untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi. Kegiatan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan permukiman merupakan kegiatan yang mendasari perumusan strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi, yang menjadi landasan utama yaitu visi dan misi pembangunan yang tertuang di dalam RPJMD pada masa periode Wali Kota terpilih.

Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi pada prinsipnya merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kota Cimahi. Penjabaran tersebut terutama pada misi yang terkait langsung dengan tugas, pokok, dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai OPD utama pengemban misi Pemerintah Kota Cimahi.

Visi Pembangunan Kota Cimahi tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut:

“Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis, dan Berbudaya”

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Kota Cimahi, diturunkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:



1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat, dan Unggul.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Profesional, Efektif, Efisien, dan Ekonomis Yang Berbasis Pada Sistem Penganggaran Yang Pro Publik.
3. Memberdayakan Perekonomian Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Yang Berorientasi Pada Pengembangan Sektor Jasa Berbasis Teknologi Informasi dan Industri Kecil Menengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan.
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan.
5. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Secara Berkesinambungan Dan Berkelanjutan.

Visi dan misi pembangunan Kota Cimahi memiliki korelasi yang kuat dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, terutama pada misi ke-empat yaitu, Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan.

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang mampu menjawab permasalahan dan kebutuhan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Cimahi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sesuai dengan masa periode Wali Kota terpilih, maka tujuan yang akan dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dalam periode 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Persamaan	Satuan	Kondisi Awal (2017)	Tahun 2018		Tahun 2019		Target Tahun 2020	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
							Target	Realisasi	Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Yang Sehat dan Layak Bagi Masyarakat	Luas Kawasan Kumuh	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Di Kota Cimahi}} \times 100\%$	Persen	23	23	98,52	42	99,53	61	80	100
			Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Kota Cimahi}}$	Hektar	7.03	7,03	61,5	6,71	12,04	5.17	12,04	12,04
		Meningkatnya Pelayanan Air Bersih/ Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	$\frac{\text{Presentase Penduduk Terlayani Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk Di Kota Cimahi}} \times 100\%$	Persen	69,17	70,52	69,34	72,02	70,35	79,24	69,65	69,82
		Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	$\frac{\text{Presentase Penduduk Terlayani Air Limbah Domestik}}{\text{Jumlah Penduduk Di Kota}}$	Persen	70,1	76,75	82,66	83,41	75,98	90,06	76,78	77,48



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

Strategi dan Arah Kebijakan dalam Rencana Strategi merupakan strategi kebijakan Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan Arah kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD serta target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan Arah kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi tahun 2017- 2022 merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi kota, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arahan kebijakan. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasarantersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab satu sasaran pembangunan ataupun lebih dari satu sasaran pembangunan, dengan mempertimbangkan aspek efektifitas dan efisiensi pencapaian target sasaran.

Kebijakan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategi tidak dimulai dari visi dan misi OPD. Untuk mengacu kepada strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Kota Cimahi tahun 2017 -



2022 perubahan, untuk mencapai visi dan misi Wali Kota Cimahi dan organisasi, Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi menetapkan kebijakan dan strategi yang diuraikan dalam table berikut ini:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2017 – 2022

VISI : Mewujudkan Cimahi Baru Maju, Agamis, dan Berbudaya			
MISI 4 : Melanjutkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Meningkatkan Kualitas Derajat Kehidupan Masyarakat Yang Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Yang Sehat dan Layak Bagi Masyarakat	Meningkatnya Perumahan dan Permukiman Yang Layak Huni	Mengembangkan Permukiman Layak Huni	1. Pembangunan Rusun 2. Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni 3. Peningkatan kapasitas pemakaman 4. Peningkatkan Pengelolaan Pemakaman 5. Peningkatkan Akses Jalan Permukiman 6. Pembangunan Talut/Bronjong 7. Pembangunan RTH 8. Peningkatkan Kualitas Rumah Akbibat Bencana
	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih	Meningkatkan Pelayanan Air Bersih	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Bersih 2. Pengelolaan Sistem Pelayanan Air Bersih 3. Peningkatan Pemberdayaan Pengelolaan Air Bersih
	Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Meningkatkan Pelayanan Air Limbah Domestik	1. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Pengelolaan Sistem Pelayanan Air Limbah Domestik 3. Peningkatan Pemberdayaan Pengelolaan Air Limbah Domestik



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada Bab sebelumnya telah dijelaskan strategi dan kebijakan maupun program - program yang akan dilaksanakan serta sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada Bab ini memuat program perangkat daerah, baik dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD, juga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cimahi. Program perangkat daerah merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Program perangkat daerah yang memuat judul program selama 5 (lima) tahun periode pembangunan jangka menengah Kota Cimahi, dilengkapi dengan indikator kinerja, target dan pagu indikatif setiap tahun, dan Perangkat Daerah penanggung jawab. Penyajian program tersebut dibagi atas 2 (dua) kelompok, yaitu program sebelum dan yang telah menerapkan nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Program yang sebelum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri meliputi Tahun 2018 sampai dengan 2020. Sementara program yang telah menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri meliputi Tahun 2021 dan 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang akan digunakan sebagai acuan dalam Rancangan Perubahan Rencana Strategis, maka program yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 – 2022 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah.
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
5. Program Pengembangan Perumahan.
6. Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh.
7. Program Pengembangan Permukiman.



8. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Adapun rencana program dan kegiatan dari setiap unit kerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi
Tahun 2017 – 2022**

Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PRASARANA PERMUKIMAN YANG SEHAT DAN LAYAK BAGI MASYARAKAT	MENINGKATNYA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG LAYAK HUNI		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1) Rasio Rumah Tidak Layak Huni.	1) 1,51%	76.060.820.000	1) 1,3%	76.060.820.000	1) 1,4%	37.000.000.000	1) 0,78%	55.000.000.000	1) 0,52%	80.500.000.000	1) 0,26%	91.000.000.000,-	1) 0,26%	DPKP	Kota Cima hi
			Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Jumlah Rumah	335 Unit	7.100.555.800,-	335 Unit	7.100.555.800,-	335 Unit	7.850.000.000,-	335 Unit	8.650.000.000,-	335 Unit	9.550.000.000,-	335 Unit	10.550.000.000,-	1.675 Unit		
			Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Kelurahan Yang Terfasilitasi	20 Lokasi	-	20 Lokasi	-	30 Lokasi	5.950.000.000,-	28 Lokasi	5.950.000.000,-	28 Lokasi	5.950.000.000,-	28 Lokasi	5.950.000.000,-	28 Lokasi	DPKP	Kota Cima hi
			Pembangunan Dekorasi Kota Baru	Titik Dekorasi Kota Baru	0 Titik	-	0 Titik	-	80 Titik	2.094.000.000	80 Titik	3.194.400.000	80 Titik	3.513.840.000	80 Titik	3.865.224.000	80 Titik	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembangunan Taman Baru	Luas Taman Baru	0 Titik		0 Titik		0.50 Hektar	6.600.000.000	1.5 Hektar	22.414.600.000	1.5 Hektar	21.100.600.000	1.5 Hektar	20.216.600.000	1.5 Hektar	DPKP	
			Pemeliharaan Dekorasi Kota	Titik Dekorasi Kota	0 Titik		240 Titik		240 Titik	1.210.000.000	120 Titik	1.331.000.000	420 Titik	1.646.100.000	500 Titik	1.610.510.000	500 Titik	DPKP	
			Pemeliharaan Taman	Luas Taman Yang Dipelihara	0 Titik		0 Titik		8.2 Hektar	3.608.000.000	8.7 Hektar	4.210.000.000	9.2 Hektar	4.984.400.000	9.7 Hektar	5.674.500.000	9.70 Hektar	DPKP	
			Penetapan Kebijakan Strategi Dan Program Perumahan	Jumlah Ded Penanganan Kumuh		408.358.700		408.358.700	3 Dokum en	450.000.000	3 Dokum en	500.000.000	3 Dokum en	550.000.000	3 Dokum en	650.000.000	12 Dokumen	DPKP	
			Pengadaan Pemakaman	Jumlah Makam Yang Disediakan		0		0	1 Lokasi	4.874.000.000	1 Lokasi	4.000.000.000	1 Lokasi	4.000.000.000	1 Lokasi	4.000.000.000	4 Lokasi	DPKP	
			Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Perumahan Dan Permukiman	Jumlah Lokasi / Hektar		65.396.243.000		65.396.243.000	-	-	-	-	-	-	-	-	Meter Persegi	DPKP	
			Pengelolaan Pemakaman	Jumlah Makam Yang Terkelola	8 Lokasi	0	8 Lokasi	0	9 Lokasi	314.000.000	10 Lokasi	500.000.000	11 Lokasi	500.000.000	12 Lokasi	500.000.000	12 Lokasi	DPKP	
			Pengelolaan Rusunawa	Persentase Tingkat Hunian RUSUNAWA	85 Persen	2.992.281.200	85 Persen	2.992.281.200	100 Persen	3.850.000.000	100 Persen	4.000.000.000	100 Persen	28.405.060.000	100 Persen	37.633.166.000	100 Persen	DPKP	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Perumahan	Jumlah Perwal Rapat	2600 Orang	163.381.300	2600 Orang	163.381.300	2600 Orang	200.000.000	2600 Orang	250.000.000	2600 Orang	300.000.000	2600 Orang	350.000.000	13000 Orang	DPKP	
			PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG	(1)Presentase Titik Longsor Yang Tertangani;	100%	1.170.961.600	100%	1.170.961.600	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	DPKP	
			Pemeliharaan Turap/Talud/Bronjong	DED	3 Loaksi	1.170.961.600	3 Lokasi	1.170.961.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN	(1)Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk;	73,53%	4.080.062.000	73,53 %	4.080.062.000	-	-	-	-	-	-	-	-	73,53%	DPKP	
			Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	Luasan areal baru	3 Lokasi	3.602.948.000	3 Lokasi	3.602.948.000	-	-	-	-	-	-	-	-	73,53%	DPKP	
			Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pemakaman	Areal pemakaman dalam kondisi baik	8 Lokasi	95.170.000	8 Lokasi	95.170.000	-	-	-	-	-	-	-	-	73,53%	DPKP	
			Pengelolaan Pelayanan Pemakaman	Luasan areal terlayani, Jumlah makam	8 Lokasi	381.944.000	8 Lokasi	381.944.000	-	-	-	-	-	-	-	-	73,53%	DPKP	
MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH	MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH			SAKIP (CC INDEKS)	B Indeks	-	BB Indeks	-	BB Indeks	-	BB Indeks	-	A Indeks	-	A Indeks	-	A Indeks	DPKP	
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran;	100%	3.438.429.200	100%	3.438.429.200	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah bulan penyediaan ATK	12 Bulan	65.400.000	12 Bulan	65.400.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan	24.000.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	66.485.000	12 Bulan	66.485.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan Non Pns	Jumlah bulan penyediaan jasa asuransi kesehatan Non PNS	12 Bulan	357.840.000	12 Bulan	357.840.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan	185.000.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	33.313.200	12 Bulan	33.313.200	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi dan listrik kantor dan UPT	12 Bulan	1.170.000.000	12 Bulan	1.170.000.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit yang terpelihara dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal DPKP	73 Unit	115.406 .000	73 Unit	115.406.000	73 Unit	-	73 Unit	-	73 Unit	-	73 Unit	-	73 Unit	DPKP	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	5.505.0 00	12 Bulan	5.505.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	DPKP	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	12 Bulan	57.600. 000	12 Bulan	57.600.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	DPKP	
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12 Bulan	277.750 .000	12 Bulan	277.750.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	DPKP	
			Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah bulan memfasilitasi perjalanan dinas rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	115.406 .000	12 Bulan	115.406.000	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	-	12 Bulan	DPKP	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR SIPIL NEGARA	(1)Persentas e ASN Yang Dibina;	100%	-	100%	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	DPKP	
			Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Pegawai	Jumlah ASN yang dibina	100%	-	100%	-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	(1)Persentas e Realisasi Anggaran;	85%	300.543.700	85%	300.543.700	85%	450.000.000	85%	465.000.000	85%	465.000.000	85%	465.000.000	85%		
			Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen	5 Dok	130.194.500	5 Dok	130.194.500	5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		5 Dok		
			Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran	0 Dok		0 Dok		0 Dok	50.000.000	0 Dok	50.000.000	0 Dok	50.000.000	0 Dok	50.000.000	0 Dok		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah Dokumen	4 Dok	94.904.500	4 Dok	94.904.500	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		16 Dok		
			Penyusunan Laporan Inventaris Barang	Jumlah Dokumen Laporan Inventaris Barang	0 Dok		0 Dok		0 Dok	25.000.000	0 Dok	25.000.000	0 Dok	25.000.000	0 Dok	25.000.000	0 Dok		
			Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	0 Do		0 Do		0 Do		0 Do		0 Do		0 Do		0 Dok		
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen	2 Dok	34.210.000	2 Dok	34.210.000	2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		10 Dok		
			Penyusunan Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan, Lkip Dan Lppd Pd	Jumlah Dokumen Lkip	0 Dok		0 Dok		0 Dok	75.000.000	0 Dok	80.000.000	0 Dok	80.000.000	0 Dok	80.000.000	0 Dok		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen	4 Dok	41.234.700	4 Dok	41.234.700	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		16 Dok		
			Penyusunan Renstra Dan Renja Pd	Jumlah dokumen RENJA	0 Dok		0 Dok		0 Dok	62.500.000	0 Dok	62.500.000	0 Dok	62.500.000	0 Dok	62.500.000	0 Dok		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
MENINGKATKAN KUALIATS PERMUKIMAN	MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA			Presentase Luasan Banjir Terhadap Luasan Kota	0,38%		0,38%		0,23%		0,15%		0,08%		0%		0%		
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUNGAI DAN PENGENDALI BANJIR	Persentase Kapasistas Pengendali Banjir Terhadap Kapasitas Pengendali Banjir Yang Ideal;	7,41%		7,41%		76,85%	190.000.000.000	86,77%	84.565.000.000	93,39%	104.664.690.000	100%	98.158.041.000	100%	DPKP	
			Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	volume saluran sungai yang dinormalisasi	0 m3		0 m3		59.000 m3	2.750.000.000	59.000 m3	2.750.000.000	59.000 m3	2.750.000.000	59.000 m3	2.750.000.000	59.000 m3	DPKP	
			Pembangunan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang baru & terpelihara	0 Unit		7 Unit		7 Unit	177.250.000.000	7 Unit	71.815.000.000	7 Unit	91.914.690.000	7 Unit	85.408.041.000	7 Unit	DPKP	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai	luasan sempadan sungai, koordinasi penegakan perda	3000 m2		3000 m2		3000 m2	10.000.000.000	3000 m2	10.000.000.000	3000 m2	10.000.000.000	3000 m2	10.000.000.000	3000 m2	DPKP	
	MENINGKATNYA PELAYANAN AIR BERSIH			Presentase Rumah Tangga Akses Layanan Air Bersih	69,79%		70,52 %		72,02%		79,24%		86,49%		93,25%		93,25%	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	(1)Persentase Peningkatan Layanan Air Bersih Perpipaan;	(1)70.52 Persen ;		(1)70.52 Perse n;										(1)70.52 Persen;	DPKP	
			Pembangunan Jaringan Air Bersi/Air Minum	Jaringan Distribusi, Sambungan Rumah (SR) baru, Artesis	(1)2.52 Persen ;		(1)2.52 Perse n;	15.459.969.100									(1)2.52 Persen;	DPKP	
			Pengelolaan Pelayanan Air Bersih	Jumlah SR yang terpeliharanya sarana SPAM Cimahi dan terlayannya pelanggan air minum	0 SR		0 SR	6.833.051.600									0 SR	DPKP	
			Peningkatan Kapasitas Pengelola Air Bersih	Bintek dan Sosialisasi	2319 SR		2319 SR	1.610.250.000									2319 SR	DPKP	
			Perencanaan Normalisasi Saluran Sungai	Kajian Normalisasi Saluran Sungai	1 Paket		1 Paket	120.000.000									1 Paket	DPKP	
			Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Studi Kelayakan SPAM, DED SPAM, Transmisi, DED distribusi, Amdal/UKL UPL, Perencanaan Artesis	3 Dokum en		3 Dokum en	331.297.600									3 Dokumen	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Perencanaan Pembangunan Reservoir	Dok SPAM, Perencanaan Reservoir Artesis	0 Dokum en	723.209 .500	0 Dokum en	723.209.500									0 Dokumen	DPKP	
			Promosi Air Bersih	Leaflet	1 Paket	25.000. 000	1 Paket	25.000.000									1 Paket	DPKP	
			Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang Saluran	0 Meter Kubik	505.739 .800	0 Meter Kubik	505.739.800									0 Meter Kubik	DPKP	
			Rehabilitasi/Pemelih aaran Bantaran Dan Tanggul Sungai	Luasan Sempadan Sungai, Koordinasi Penegak Perda	3000 Meter Persegi	1.458.8 33.200	3000 Meter Persegi	1.458.833.200	3000 Meter Persegi		3000 Meter Persegi		3000 Meter Persegi		3000 Meter Persegi		3000 Meter Persegi	DPKP	
			Rehabilitasi/Pemelih aaran Jaringan Air Bersih/Air Minum	Artesis, Jaringan Pipa Distribusi, SR	0 Paket	758.432 .000	0 Paket	758.432.000									0 Paket	DPKP	
			Rehabilitasi/Pemelih aaran Normalisasi Saluran Sungai	Panjang Saluran	500 Meter Kubik	1.587.2 84.400	500 Meter Kubik	1.587.284.400	500 Meter Kubik		500 Meter Kubik		500 Meter Kubik		500 Meter Kubik		500 Meter Kubik	DPKP	
			PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA	(1)Persentas e Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik;	80%	680.416 .700	80%	680.416.700										DPKP	
			Pemeliharaan Rehabilitasi Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung yang terpelihara	6 Unit	319.057 .800	6 Unit	319.057.800										DPKP	
			Perencanaan Embung Dan Bangunan Penampung Air Lainnva	FS, DED	2 Dok	361.358 .900	2 Dok	361.358.900										DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR BERSIH	(1)Total Kapasitas SR Air Bersih;	(1)1213 6 SR;	291.216 .000	(1)121 36 SR;	291.216.000	(1)1273 6 SR;	23.470.925.95 5	(1)3253 6 SR;	65.385.356.26 6	(1)3313 6 SR;	28.160.000.00 0	(1)3373 6 SR;	26.380.000.000	(1)33736 SR;	DPKP	
			Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	Volume Saluran Sungai yang di Normalisasi	58500 Meter Kubik	291.216 .000	58500 Meter Kubik	291.216.000	0 Meter Kubik	0	0 Meter Kubik	0	0 Meter Kubik	0	0 Meter Kubik	0	58500 Meter Kubik	DPKP	
			Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah sarana pengolahan air bersih yang terbangun/ yang teroptimalisasi	0 SR	0	0 SR	0	1600 SR	20.570.925.95 5	7900 SR	62.085.356.26 6	7820 SR	24.710.000.00 0	7200 SR	23.030.000.000	24520 SR	DPKP	
			Pengelolaan Pelayanan Air Bersih	Jumlah SR yang terpelihara dan terlayani air bersih	2319 SR		2319 SR		2819 SR	2.000.000.000	4319 SR	2.500.000.000	6319 SR	2.750.000.000	7319 SR	2.750.000.000	7319 SR	DPKP	
			Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah Dokumen dan Kegiatan Perencanaan Pembangunan	0 Dokum en		0 Dokum en		20 Dokum en	900.000.000	18 Dokum en	800.000.000	16 Dokum en	700.000.000	14 Dokum en	600.000.000	68 Dokumen	DPKP	
	MENINGKATNYA PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK			(1)Presentase Cakupan Pelayanan Air Limbah Domestik; (2)Presentase Peningkatan Kapasitas IPAL Komunal;	(1)76,50 Persen ; (2)0 Persen ;		(1)76,50 Perse n; (2)0 Perse n;		(1)83,41 Persen ; (2)0 Persen ;		(1)0 Persen ; (2)90,06 Persen ;		(1)0 Persen ; (2)92,81 Persen ;		(1)0 Persen ; (2)95,56 Persen ;		(1)0 Persen; (2)98,31 Persen;		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	(1)Persentase Peningkatan Kapasitas IPAL Komunal;	(1)4.03 Persen ;	14.075.530.829	(1)4.03 Perse n;										(1) Persen;	DPKP	
			Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan	Jumlah Lokasi		108.758.700											0 Lokasi	DPKP	
			Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	SPAL Komunal baru, Jaringan Perpipaan, SR, IPLT/IPAL Baru	40 Paket	10.003.452.900	40 Paket										70 Paket	DPKP	
			Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	SR, SPAL	10 SPAL	1.497.651.429	10 SPAL										19 SPAL	DPKP	
			Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sanitasi	Bintek, Sosialisasi	2 Paket	351.600.000	2 Paket										4 Paket	DPKP	
			Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	FS IPLT, DED IPLT, Perencanaan SPAL, SR, MCK	8 Dokum en	803.660.000	8 Dokum en										8 Dokumen	DPKP	
			Promosi Sanitasi	Maket, Leaflet	2 Paket	50.000.000	2 Paket										4 Paket	DPKP	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Limbah	IPAL, Jaringan Perpipaan, SR, MCK	8 Unit	1.260.407.800	8 Unit										16 Unit	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK	(1)Persentase Peningkatan Kapasitas IPAL Komunal;	(1)4.03 Persen ;		(1)4.03 Perse n;		(1)12.9 Persen ;	18.297.564.37 5	(1)17.1 4 Persen ;	26.800.000.00 0	(1)17.0 7 Persen ;	31.100.000.00 0	(1)17.0 7 Persen ;	35.150.000.000	(1)17.07 Persen;	DPKP	
			Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah	Jumlah sarana pengolahan air limbah yang terbangun/ yang teroptimalisasi	0 Paket		0 Paket		30 Paket	11.297.564.37 5	25 Paket	21.300.000.00 0	25 Paket	25.550.000.00 0	25 Paket	30.050.000.000	105 Paket	DPKP	
			Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	SR, SPAL	10 SPAL		10 SPAL		12 SPAL	2.000.000.000	16 SPAL	2.500.000.000	20 SPAL	2.750.000.000	24 SPAL	3.000.000.000	24 SPAL	DPKP	
			Perencanaan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Limbah	Jumlah Dokumen Perencanaan	0 Dokum en		0 Dokum en		10 Dokum en	2.500.000.000	10 Dokum en	1.500.000.000	10 Dokum en	1.400.000.000	10 Dokum en	1.050.000.000	40 Dokumen	DPKP	
	MENINGKAT NYA PELAYANAN DRAINASE PERMUKIMA N			(1)% luasan genangan terhadap luas kota;	(1)0.18 Persen ;		(1)0.14 Perse n;		(1)0.06 Persen ;		(1)0.01 9 Persen ;		(1)0.00 5 Persen ;		(1)0 Persen ;		(1)0 Persen;		
			PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORON G-GORONG	(1)Menurunn ya Area Genangan;	(1)N/A Persen ;		(1)0.46 Perse n;	9.338.436.200									(1) Persen;		
			Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase baru	2500 Meter Lari		2500 Meter Lari	2.859.208.600									5000 Meter Lari		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase terpelihara	2500 Meter Lari	2.859.208.600	2500 Meter Lari	2.859.208.600									3000 Meter Lari		
			Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	FS, DED	3000 Meter Lari	5.915.863.600	3000 Meter Lari	5.915.863.600									16 Dokumen		
			PROGRAM PENINGKATAN SALURAN DRAINASE/ GORONG-GORONG	(1)Persentase Saluran Drainase Dalam Kondisi Baik;	16 Dokumen	563.364.000	16 Dokumen	563.364.000	(1)80 Persen ;	12.151.927.596	(1)80 Persen ;	10.000.000.000	(1)80 Persen ;	12.000.000.000	(1)80 Persen ;	12.000.000.000	(1)80 Persen;		
			Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Panjang saluran drainase baru/terpelihara	(1)80 Persen ;	0	(1)80 Persen;	0	5500 Meter lari	12.151.927.596	5500 Meter lari	10.000.000.000	5500 Meter lari	12.000.000.000	5500 Meter lari	12.000.000.000	5500 Meter lari		
	MENINGKAT NYA PEMBANGUN AN YANG BERKELANJ UTAN			Presentase Taman kota dan Taman Lingkungan dalam kondisi baik;	(1)0.191 Persen ;		(1)0.204 Persen;		(1)0.216 Persen ;		(1)0.229 Persen ;		(1)0.241 Persen ;		(1)0.254 Persen ;		(1)0.254 Persen;		
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	(1)Persentase Ruang Terbuka Hijau;	(1)11.15 Persen ;		(1)11.15 Perse n;	16.641.010.900	(1) - Persen ;	0	(1) - Persen ;	0	(1) - Persen ;	0	(1) - Persen ;	0	(1) Persen;		
			Pembangunan Dekorasi Kota Baru	Titik Dekorasi Kota Baru	80 Titik		80 Titik	2.933.279.800	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	0 Titik	0	80 Titik		
			Pembangunan Taman Baru	Luas Taman Baru	0,50 Hektar		0,50 Hektar	9.825.352.900	0 Hektar		0 Hektar		0 Hektar		0 Hektar		0 Hektar		
			Pemeliharaan Dekorasi Kota	Titik Dekorasi Kota	100 Titik		160 Titik	1.005.854.600	0 Titik		0 Titik		0 Titik		0 Titik		160 Titik		
			Pemeliharaan Taman	Jumlah Taman, Luas Taman	7.2 Hektar		7.7 Hektar	2.876.523.600	0 Hektar		0 Hektar		0 Hektar		0 Hektar		7.70 Hektar		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH											12.042.651.900					
				Nilai Sakip Perangkat Daerah									BB		BB		BB		
			ADMINISTRASI KEUANGAN											8.949.322.200					
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN									69 Org	8.945.822.200			69 Org		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen									2 Dok	3.500.000			2 Dok		
			ADMINISTRASI UMUM											2.837.780.700					
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit									31 Unit	900.960.000					
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Unit									5 Unit	89.625.000					
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Bulan									12 Bulan	17.344.500					
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bulan									12 Bulan	24.000.000					
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Bulan									12 Bulan	74.261.500,					
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit									31 Unit	126.550.000					



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan									12 Bulan	42.741.000	12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Bulan									12 Bulan	993.000.000	12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan									12 Bulan	117.660.000	12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan									12 Bulan	1.331.600	12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Bulan									12 Bulan	45.731.500	12 Bulan		12 Bulan		
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan									12 Bulan	229.730.600	12 Bulan		12 Bulan		
			Rapat-Rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah Bulan									12 Bulan	174.845.000	12 Bulan		12 Bulan		
			PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pegawai									203 Org	122.416.000	203 Org		203 Org		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pegawai									203 Org	122.416.000	203 Org		203 Org		
			PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah Dokumen									12 Dok		12 Dok		24 Dok		
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen									6 Dok	84.893.000,00	6 Dok		12 Dok		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen									4 Dok	7.240.000,00	4 Dok		8 Dok		
			Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen									2 Dok	3.500.000,00	2 Dok		4 Dok		
			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1) Kapasitas Sungai dan bangunan penampung air 2) Presentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat									1)78.85 2 m2 2)80%	9.002.303.028			1)78.852 m2 2)80%		
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman pada Wilayah Sungai										8.147.303.028					
				Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder								1 Unit	100.000.000			1 Unit		
				Rehabilitasi Tanggul Sungai	Jumlah Panjang Tanggu l								180 m2	1.000.000.000			180 m2		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Normalisasi/Restorasi/ Pemeliharaan Sungai	volume sungai yang dinormalisasi									56.425 m2	6.802.303.028			56.425 m2		
			Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam retensi Yang dioperasikan & dipelihara									5 Unit	245.000.000			5 Unit		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha																
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi yang direhabilitasi									400 m2	655.000.000			400 m2		
			Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendungan Irigasi yang direhabilitasi									1 Unit	50.000.000			1 Unit		
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Panjang jaringan irigasi yang dipelihara									3.600 m2	150.000.000			3.600 m2		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM																
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM										1.053.604.371					



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis SPAM	Jumlah Dokumen									6 Dokum en	1.053.604.371			6 Dokumen		
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Daerah Kabupaten/Kota											5.963.372.000					
			Supervisi Pembangunan/Penin gkatan/Perluasan/Pe rbaikan SPAM	Jumlah Dokumen Supervisi SPAM dan SR									3 Dokum en	195.000.000			3 Dokumen		
			Pembangunan SPAM Di Kawasan Perkotaan	1. Jumlah SPAM, 2. Jumlah SR 3. Pipa Distribusi									1). 0 2). 0 SR 3). 3,65 KM	2.415.495.000			1). 0 2). 0 SR 3). 3,65 KM		
			Operasi Dan Pemeliharaan SPAM Di Kawasan Perkotaan	1. Jumlah SPAM, 2. Jumlah SR									4.457 SR	3.352.877.000			4.457 SR		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR LIMBAH	1) Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik 2)Nilai Beban Tercemar									1)76,78 % 31 2)Ton/hr	4.772.686.154			1)76,78% 31 2)Ton/hr		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota																
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan SPALD									4 Dokum en (DED IPLT, AMDAL IPLT, Perenc anaan SPALD)	1.050.000.000			4 Dokumen (DED IPLT, AMDAL IPLT, Perencan aan SPALD)		
			Supervisi Pembangunan/Reha bilitasi/Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Dokumen Supervisi SPALD									3 Dokum en	150.000.000			3 Dokumen		
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah IPALD, 2. Jumlah SR, 3.Jumlah MCK, 4. Jumlah Septictank yang dibangun									5 UNIT MCK, 5 UNIT Septict ank individu al < 10KK, 1 unit Sarana sanitasi untuk lomba, 7 UNIT SPALD T DAK 420 SR	1.244.406.178			5 UNIT MCK, 5 UNIT Septictan k individual < 10KK, 1 unit Sarana sanitasi untuk lomba, 7 UNIT SPALDT DAK 420 SR		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Rehabilitasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SPALD Yang direhabilitasi									2 SPALD	363.279.976			2 SPALD		
			Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah sistem pengolahan air limbah domestik yang ditingkatkan									0	-			0		
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kegiatan Pembinaan Teknik pengelolaan Air Limbah Domestik									1 Kegiatan AKSANSI	75.000.000			1 Kegiatan AKSANSI		
			Sosialisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	jumlah pelaksanaan Sosialisasi									1 Kegiatan KSM (DAK)	75.000.000			1 Kegiatan KSM (DAK)		
			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1. Jumlah IPALD Yang dipelihara, 2. Jumlah SR Yang dipelihara									1) 15 SPALD 2) 1.100 SR	1.815.000.000			1) 15 SPALD 2) 1.100 SR		
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase luas genangan									0,075%	2.125.706.018			0,075%		
			Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota										0,075%	2.125.706.018			0,075%		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan (Rencana induk, studi kelayakan, Rencana Detail) Yang disusun									6 Dokum en	102.000.000			6 Dokumen		
			Supervisi Pembangunan/Penin gkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan Dan Lingkungan	Jumlah kegiatan supervisi pembangunan /peningkatan/r ehabilitasi									6 Kegiata n	85.000.000			6 Kegiatan		
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan dan lingkungan	Panjang saluran drainase yang dibangun									60 m2	400.000.000			60 m2		
			Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang saluran drainase yang ditingkatkan									80 m2	120.706.018			80 m2		
			Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan dan Lingkungan	Panjang saluran drainase yang direhabilitasi									700 m2	1.100.000.000			700 m2		
			Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan dan Lingkungan	jumlah sarana sistem drainase yang tersedia (unit)									1 unit	100.000.000			1 unit		
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dipelihara									16.200 m2	218.000.000			16.200 m2		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Presentase Sarana Permukiman Yang Tersedia: 1. Jalan Setapak 2. Taman 3. Pemakaman									1) Jalan Setapak 1,6%, 2) Taman 0,058% 3) Pemakaman 7,6%				1) Jalan Setapak 1,6%, 2) Taman 0,058% 3) Pemakaman 7,6%		
			Penyelenggaraan Infrastruktur Pada Permukiman											6.700.720.024					
			Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman											2.786.120.024					
			Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman	1. Luas Pemeliharaan Jalan Setapak 2. Luas Pemeliharaan Taman 3. Pengelolaan/ pemeliharaan Pemakaman									1)0 m2 2)92.000 m2 3)8 Lokasi	3.914.600.000			1)0 m2 2)92.000 m2 3)8 Lokasi		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1)Presentase tingkat hunian 2) Presentase Rumah Korban Bencana									1)100% 2)100%	3.725.204.171			1)100% 2)100%		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum Dan/atau Rumah Khusus										100%	3.125.204.171			100%	DPKP	
			Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan Dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	1. Jumlah kegiatan untuk memfasilitasi 2. Jumlah kegiatan fasilitasi pengelolaan kelembagaan									100%	3.125.204.171			100%	DPKP	
			Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota															DPKP	
			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang Dibangun									0 Rumah	-			0 Rumah	DPKP	
			Penyusunan Site Plan Dan/atau Detail Engineering Design (DED) Bagi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen									1 Dokum en	100.000.000			1 Dokumen	DPKP	
			Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Yang Direhabilitasi									30 Rumah	500.000.000			30 Rumah	DPKP	



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	1.Presentase Rumah Tidak Layak Huni 2. luas kawasan kumuh ringan									1)1,45 % 2)12,04 Ha	5.200.000.000			1)1,45% 2)12,04 Ha		
			Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha																
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni									175 Rutilahu	3.900.000.000			175 Rutilahu		
			Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni									35 Rutilahu	700.000.000			35 Rutilahu		
			Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) Dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen									2 Dokumen	300.000.000			2 Dokumen		



Tujuan	Sasaran	Ko de	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome)	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra	Unit Kerja Perang kat Daerah	Loka si
					2017		2018		2019		2020		2021		2022				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha											300.000.000					
			Survei Dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen									1 Dokum en	100.000.000			1 Dokumen		
			Penyusunan Rencana Dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh Dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen									1 Dokum en	100.000.000			1 Dokumen		
			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Jumlah Kegiatan									16 Kegiata n Sosialis asi	100.000.000			16 Kegiatan Sosialisasi		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi akan membuat laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran berupa keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu:

1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi;
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik;
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah;
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan;
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka disusun suatu indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, dimana indikator tersebut menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Tujuan Penetapan IKU untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan



diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil utama dari unit-unit kerja (Bidang) di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi adalah mencerminkan indikator impacts dari seluruh sasaran strategis Dinas yang merupakan gabungan, perampatan dan sinergitas dari seluruh indikator kinerja utama (outcome) unit-unit Eselon III (Bidang) adalah sebagai berikut: Jumlah kawasan permukiman yang tertangani infrastruktur permukiman (jalan lingkungan/jalan setapak, penanganan rumah tidak layak huni, penanganan kawasan kumuh), mendapat akses prasarana dan sarana sanitasi, mendapat pelayanan air minum/bersih, penanganan banjir dan genangan, penataan taman dan dekorasi kota serta pengelolaan pemakaman.

Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 lampiran I menggambarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Bidang urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi yang meliputi urusan Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dari tabel 7.1 berikut ini :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2017 – 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus/Persamaan	Satuan	Kondisi Awal RENSTRA	Target Tahun					Kondisi Akhir RENSTRA
							2018	2019	2020	2021	2022	
Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Permukiman Yang Sehat dan Layak Bagi Masyarakat	Luas Kawasan Kumuh	Meningkatnya Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni	Persentase Rumah Layak Huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah Di Kota Cimahi}} \times 100\%$	%	23%	23%	42%	61%	80%	100%	100%
			Luas Kawasan Kumuh Sedang dan Kumuh Ringan	$\frac{\text{Luas Kawasan Kumuh}}{\text{Luas Wilayah Kota Cimahi}}$	Ha	7,03 Ha	7,03 Ha	6,71 Ha	5,17 Ha	12,04 Ha	12,04 Ha	12,04 Ha
		Meningkatnya Pelayanan Air Bersih/ Air Minum	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih/Air Minum	$\frac{\text{Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Bersih}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	%	70,52%	70,52%	72,02%	79,24%	69,65%	69,82%	69,82%
		Meningkatnya Pelayanan Air Limbah Domestik	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Domestik	$\frac{\text{Presentase Penduduk Yang Terlayani Air Limbah}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	%	76,75%	76,75%	83,41%	90,06%	76,78%	77,48%	77,48%



BAB VIII

PENUTUP

8.1. Penutup

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan suatu proses penyempurnaan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 dokumen ini berisi kerangka kebijakan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi serta program dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, penyusunan dokumen ini berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025, dan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan perencanaan Perangkat Daerah yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama seluruh *stakeholders* pembangunan daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Cimahi selama periode Tahun 2017 - 2022, serta menjadi arah dan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun untuk mewujudkan Visi Kota Cimahi : ***Menuju Cimahi “BARU” Maju, Agamis dan Berbudaya***. Selanjutnya dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 - 2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi ini merupakan pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Cimahi.



Keberhasilan implementasi pelaksanaan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sangat tergantung dari seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Meskipun Dokumen Perubahan Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Cimahi, 01 September 2020

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
KOTA CIMAH,**

Ir. MUHAMAD NUR KUSWANDANA, M. Eng.S
Pembina Utama Muda
NIP. 196111121989031007